

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

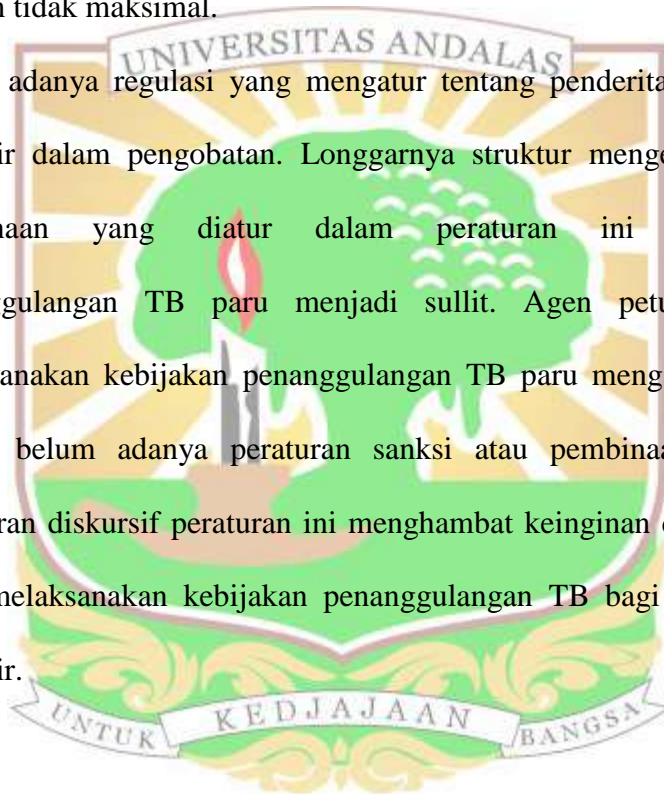
Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam Bab V dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan program penanggulangan TB Paru di Kecamatan Meral belum terlaksana secara maksimal. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini dilihat dari pencegahan yang dilakukan belum maksimal, ditandai dengan kurangnya sosialisasi dan tidak ada pemberian vaksin pencegahan kepada BALITA yang kontak langsung dengan penderita TB. Selain itu, dalam penjarangan suspek juga terjadi kendala yaitu, suspek TB yang telah ditemukan tidak mau memeriksakan diri ke puskesmas. Dalam pemeriksaan fisik dan laboratorium juga memerlukan waktu yang lama dikarenakan masih ada penderita dan suspek yang tidak bisa membedakan sampel dahak. Selanjutnya dalam pendampingan, PMO sebagai agen tidak memaksimalkan perannya sebagai pendamping dari penderita TB paru.
2. Kendala implementasi kebijakan penanggulanagn TB Paru di Kecamatan Meral sebagai berikut :
 - a. Fasilitas kesehatan khusus penyakit TB yang masih bergabung dengan fasilitas kesehatan lainnya di tingkat puskesmas dan poskeskel. Dimana fasilitas kesehatan khusus TB harus terpisah dari fasilitas kesehatan lainnya karena penularan penyakit TB yang sangat berbahaya.

Keterbatasan fasilitas kesehatan khusus TB yang ada mengakibatkan penanggulangan penyakit TB pun tidak maksimal.

b. Tenaga kesehatan khusus TB yang masih minim sehingga tenaga kesehatan yang khusus menangani penyakit TB Paru keteteran dikarenakan banyaknya penderita TB yang harus ditangani. Keterbatasan tenaga kesehatan yang ada mengakibatkan penanganan terhadap penderita TB pun tidak maksimal.

c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penderita TB paru yang mangkir dalam pengobatan. Longgarnya struktur mengenai sanksi dan pembinaan yang diatur dalam peraturan ini mengakibatkan penanggulangan TB paru menjadi sulit. Agen petugas TB yang melaksanakan kebijakan penanggulangan TB paru mengalami hambatan karena belum adanya peraturan sanksi atau pembinaan dan dengan kesadaran diskursif peraturan ini menghambat keinginan dari petugas TB yang melaksanakan kebijakan penanggulangan TB bagi penderita yang mangkir.



6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas kesehatan yang terkait dengan kebijakan penanggulangan TB paru agar memperbanyak sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada

masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penderita TB dan masyarakat secara umum tentang TB paru dan bahaya TB.

2. Dinas kesehatan yang terkait dengan kebijakan penanggulangan TB paru agar dapat memberikan pelatihan kepada PMO secara menyeluruh dan bertahap sehingga masing-masing PMO dapat memahami tugasnya.
3. Dalam upaya penanggulangan TB paru sebaiknya dinas kesehatan menganggarkan penambahan fasilitas kesehatan khusus penanganan TB seperti pembangunan ruangan TB yang terpisah dari ruangan-ruangan pelayanan kesehatan lainnya di tingkat puskesmas dan poskeskel. selanjutnya penambahan jumlah petugas TB di tingkat puskesmas dan poskeskel agar memadai dan fokus dalam penanganan TB. Sehingga program penanggulangan TB bisa dilaksanakan secara maksimal.

